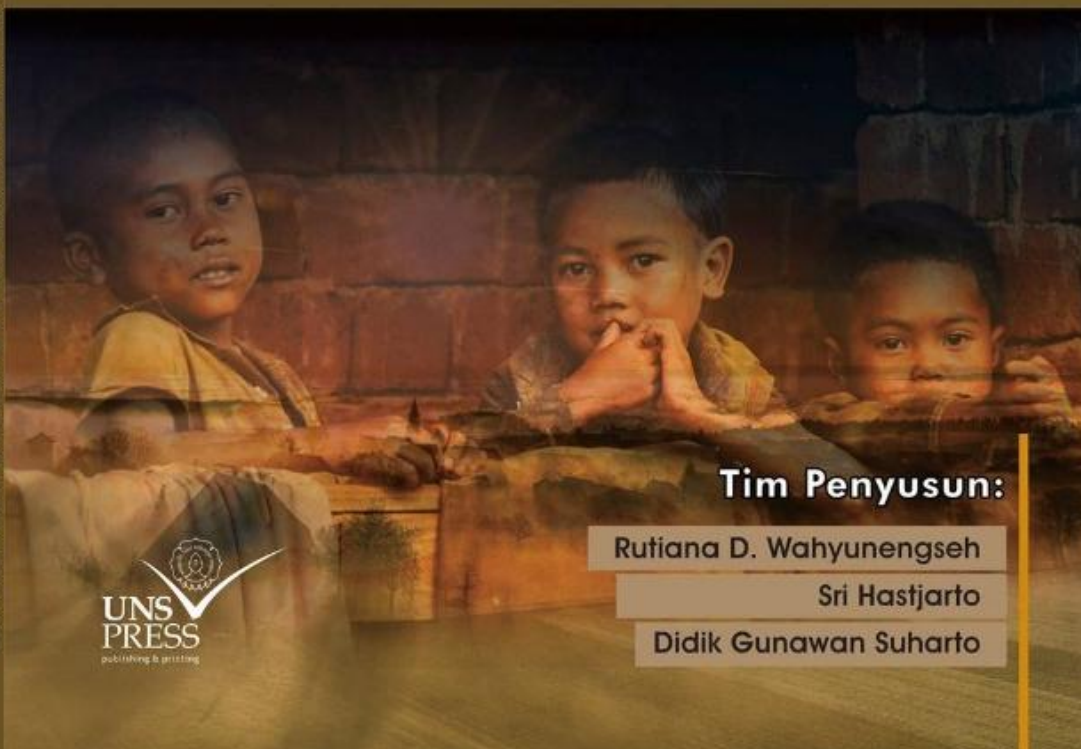


KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM PERSPEKTIF

COLLABORATIVE GOVERNANCE



Tim Penyusun:

Rutiana D. Wahyunengseh

Sri Hastjarto

Didik Gunawan Suharto

**Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
dalam Perspektif
COLLABORATIVE
GOVERNANCE**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Rutiana D. Wahyunengseh, dkk.

**Kebijakan
Penanggulangan Kemiskinan
dalam Perspektif
COLLABORATIVE
GOVERNANCE**

UNS PRESS

**Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif
COLLABORATIVE GOVERNANCE.**

Hak Cipta @ Rutiana D. Wahyunengseh, dkk. 2019

Penulis

Rutiana D. Wahyunengseh
Sri Hastjarjo
Didik Gunawan Suharto

Editor

Sri Hastjarto

Ilustrasi Sampul

Isnaini Koirunnisa

Penerbit dan Percetakan

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia 57126
Telp. (0271) 646994 Psw. 341 Fax. 0271 7890628
Website : www.unspress.uns.ac.id
Email : unspress@uns.ac.id

Cetakan 1, Edisi I, Agustus 2019
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

ISBN 978-602-397-295-1

KATA PENGANTAR

Buku “**Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Collaborative Governance**” ini merupakan kumpulan tulisan yang dihasilkan dari penelitian dengan topik besar kebijakan kemiskinan. Pokok-pokok pikiran yang dikompilasi dalam buku ini juga pernah digunakan sebagai bahan presentasi di beberapa *international conference* yang dipublikasikan dalam bahasa asing (*english*).

Gagasan yang ditulis dalam buku ini membahas isu kemiskinan sebagai fenomena masalah publik yang bersifat multidimensional dan kontekstual. Isu kemiskinan yang dibahas buku ini merujuk pada tantangan isu strategis Sustainable Development Goals yang menjadi fokus pembangunan global hingga tahun 2030. Pemerintah pusat hingga pemerintah Daerah diamanatkan mengamankan pencapaian target-target SDGs, dimana isu kemiskinan menempati posisi tujuan SDGs yang pertama.

Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan memerlukan kolaborasi dengan dunia usaha dalam kerangka anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) atau TJSLP (Tanggungjawab Sosial Lingkungan Perusahaan). Selain dunia usaha, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga memerlukan kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk pemberdayaan masyarakat. Efek kolaborasi multi aktor dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan rentan memunculkan beberapa eksekusi yang tidak dikehendaki dan berpotensi kontra produktif. Fenomena tersebut dalam buku ini direpresentasikan dalam bahasan tentang efek patologis implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Pasca revolusi industri 4.0 menuju Society 5.0, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari penetrasi ICT dalam pelaksanaannya. Penetrasi ICT menimbulkan isu digital poverty

sebagai akibat digital divide yang dialami oleh kelompok miskin. Dalam kondisi demikian broker informasi memainkan peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha dengan kelompok miskin. Buku ini membahas isu tersebut dibawah kumpulan artikel yang membahas ICT dan kemiskinan.

Semoga buku ini bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat dengan isu-isu kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Surakarta, Agustus 2019

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH: TANTANGAN <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i>	1
A. Pendekatan Teoritis Penanggulangan Kemiskinan	4
B. Kebijakan <i>Pro-Poor</i> Sebagai Politik Anggaran	7
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	10
D. Prospek Pencapaian Tujuan SDGs “ <i>End Poverty</i> ”	16
REFERENSI	16
BAB II. KERANGKA KOLABORASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	19
A. Model Tata Kelola Kolaboratif	19
B. CSR dan Penanggulangan Kemiskinan	25
C. CSR dalam Praktik di Indonesia.....	31
REFERENSI	37
BAB III. PATOLOGI AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH	41
A. Pengarusutamaan <i>Pro-Poor</i> dalam Perencanaan Daerah	41

	B. Jebakan Patologis dalam Kebijakan Nasional <i>Public Policy</i>	44
	C. Kesimpulan	51
	REFERENSI	53
BAB IV.	PEMERINTAHAN LOKAL DAN PENANGGULA- NGAN KEMISKINAN	55
	A. Pendahuluan	55
	B. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	56
	C. Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Kelembagaan Desa	62
	D. Penutup	67
	REFERENSI	68
BAB V.	PERAN AKTIVIS MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMISKINAN DAERAH: KOMODIFIKASI	71
	A. Siapakah Aktif warga (<i>Active Citizen</i>) ?	73
	B. <i>Active Citizen</i> dan Akuntabilitas Program Penanggulangan Kemiskinan	80
	C. Paradoks Demokrasi dan Dampaknya	84
	REFERENSI	85
BAB VI.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN	91
	A. Pendahuluan	91
	B. Metode	96
	C. Hasil dan Pembahasan	96
	D. Kesimpulan	101
	REFERENSI	102

BAB VII.	PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	105
	A. Pendahuluan	107
	B. Metode	108
	C. Hasil dan Pembahasan	109
	D. Kesimpulan	113
	REFERENSI	115
BAB VIII.	CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK KEMISKINAN ANAK DI ERA 4.0	119
	A. Pendahuluan	119
	B. Kajian Literatur	122
	C. Metodologi	129
	D. Hasil dan Analisis	133
	E. Kesimpulan dan Rekomendasi	142
	REFERENSI	145
BAB IX.	PERAN BROKER INFORMASI MENJEMBATANI KESENJANGAN DIGITAL KELOMPOK MISKIN DI ERA PEMERINTAHAN DIGITAL	149
	A. Pendahuluan	149
	B. Kajian Literatur	153
	C. Hasil dan Diskusi	160
	D. Kesimpulan	167
	REFERENSI	169

BAB X.	KOMUNIKASI LINTAS PELAKU UNTUK SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PEMBELAJARAN DARI KOTA MAGELANG	175
	A. Latar Belakang	175
	B. Persepsi Pemerintah, Dunia Usaha, dan Masyarakat Tentang CSR	176
	C. Pelembagaan CSR/TJSL	177
	D. Model <i>Collaborative Governence</i> untuk Pengelolaan CSR bagi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	179
	E. Rekomendasi	184
	REFERENSI	186
	DAFTAR PUSTAKA	187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kerangka Logis Antar Variabel Kemiskinan dalam Konsep Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	12
Gambar 2.1.	Model <i>Collaborative Governance</i>	20
Gambar 2.2.	Model <i>Collaborative Governance</i> Regime (CGR)	23
Gambar 4.1.	Keterkaitan Pertanian, Struktur Pasar, dan Kesejahteraan Masyarakat.....	62
Gambar 4.2.	Model Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Desa	64
Gambar 4.3.	Model Pemberdayaan Kelembagaan Pemerintah Desa	67
Gambar 5.1.	<i>The Cause-Effect Active Citizen-Klientilism/ Patronage Paradox</i>	85
Gambar 10.1.	Model kolaborasi Pemerintah Kota Magelang dengan CSR/TJSL Perusahaan untuk Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	180

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Regulasi yang Mengisyaratkan CSR di Indonesia	34
Tabel 8.1.	Problematika Implementator Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan	112
Tabel 10.1.	Pembagian Peran Tindak Lanjut Sinergitas TJSL/ CSR untuk Penanggulangan Kemiskinan Daerah	181

BAB I.

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH: TANTANGAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

The Sustainable Development Goals (SDGs) berlaku sejak 1 Januari 2016 sampai akhir tahun 2030 dengan 169 target, sebagai kelanjutan dari kesepakatan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang telah berakhir periodenya pada tahun 2015. Hasil penelitian pencapaian MDGs menemukan bahwa Perkembangan beberapa indikator pembangunan di Indonesia menunjukkan belum seimbang nya pembangunan, sektor ekonomi, sosial lebih dominan dan kurang prioritas pada lingkungan (Fauzi & Octavianus, 2014). Oleh karena itu era SDGs diproyeksikan lebih memberikan keseimbangan, supaya pembangunan peningkatan kualitas kesejahteraan bangsa tidak merusak hak generasi yang akan datang atas keselamatan bumi (Susilo, 2015).

SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs memiliki 17 tujuan dengan 169 indikator. Peran pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat lokal berandil besar untuk mensukseskan tercapainya tujuan SDGs. Peran strategis tersebut dikarenakan pemerintah kota dan kabupaten (a) berada lebih dekat dengan warganya; (b) memiliki wewenang dan dana; (c) dapat melakukan berbagai inovasi; serta (d) ujung tombak

penyedia layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah. Pemerintah daerah diamanatkan oleh pemerintah pusat menyukseskan pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensinya, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan secara seimbang. Undang-undang Republik Indonesia no 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang Republik Indonesia no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa:

1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari (i) Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun 20 tahun, (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 1 tahun, (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun.
2. Prioritas pembangunan nasional wajib diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah Prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) harus diprioritaskan dalam RPJMD.

Ketentuan yang di atur dalam kedua Undang-undang tersebut menjadi kerangka kerja bagi pencapaian target SDGs melalui program dan kegiatan pembangunan oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Salah satu tujuan dalam SDGs adalah "mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (*End poverty in all its forms everywhere*)."
Tujuan pertama ini memiliki 7 target, dimana cakupannya memuat elemen dari tujuan SDGs lainnya. Target dari tujuan pertama SDGs yaitu:

- a. Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang di mana pun, di mana ukuran yang digunakan sekarang adalah mereka yang hidup dengan pendapatan kurang dari \$ 1,25 perhari.
- b. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya separuh proporsi dari laki-laki, perempuan dan anak-anak segala umur yang

D. Prospek Pencapaian Tujuan SDGs “End Poverty”

Prospek pencapaian SDGs, terutama tujuan pertama, yaitu "End poverty in all its forms everywhere" sangat prospektif di Indonesia. Faktor pendukung dari sisi demand side yaitu: (a) adanya Non Government Organization yang mengembangkan program kemiskinan dibantu lembaga donor; (b) adanya forum warga kelompok rentang yang didampingi NGO untuk penguatan kapasitas melakukan advokasi hak ekonomi dan sosialnya.

Selain peluang keberhasilan, ada juga tantangan yang dihadapi dalam pencapaian tujuan SDGs, yaitu munculnya gejala patologi. Dari sisi pemerintah ditemukan gejala patologi *reification of obligations and author* dan patologi *bureaucratic opportunism*. Dari sisi masyarakat ditemukan Patologi Patronasi, *klientilisme/favoritisme*, patologi komodifikasi suara warga, patologi makelar/broker.

REFERENSI

- Blakey, H. (2016). Radical innovations or technical fix? Participatory Budgeting in Bradford: how Latin American participatory traditions are reinterpreted in British context. *University of Bradford: International Centre for Participation Studies Department of Peace Studies*, -.
- Fauzi, A., & Oxtavianus, A. (2014). The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 15, No.1*, 68-83.
- Feldman, L. C. (2016). Redistribution, recognition, and the state: The irreducibly political dimension of injustice. *Sage: Political Theory Vol.30*, 410-440.

- Franklin, A. L., & Raadschelders, J. C. (2004). Ethics in Local Government Budgeting - Is There a Gap Between Theory and Practice? (FALL, 2003-WINTER 2004), pp. 456- 490. *Public Administration Quarterly Vol. 27 No. 3/4*, 456-490.
- Fraser, N. (2003). From redistribution to recognition? In R.J. Antonio (Ed.), *Marx and Modernity: Key Readings and Commentary*. Malden, MA: Blackwell Publishing, 379-386.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Hôgye, M. (2002). *Theoretical Approaches to Public Budgeting*. -: -.
- Kelly, J., & Rivenbark, W. (2011). *Performance Budgeting for State and local Government*. New York: M.E. Sharpe.
- Lehning, A. J. (2016). Political Science Perspectives on Poverty. *Journal of Human Behavior in the Social Environment Vol. 6*, 87-103.
- Morgan, D. (2002). *Handbook on Public Budgeting, Prepared for the Oregon State Fiscal Association*. -: -.
- Provan, K. G., & Milward, H. B. (2001). Do Networks Really Work? A Framework for Evaluating Public-Sector Organizational Networks. *Public Administration Review*, 61, 414-423.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Rubin, I. S. (2006). *The Politics of Budgeting*. Washington DC: CQ Press.

- Susilo, W. (2015). Dari MDGs menuju SDG's. *Pertemuan Nasional Masyarakat Sipil untuk SDGs*. (pp. -). Jakarta: -.
- Wahyunengseh, R. D. (2016). *Patologi Akuntabilitas Sosial (Studi Kasus dalam Proses Perencanaan Penganggaran Daerah di Kota Surakarta dan Kota Magelang)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: -.
- Welham, B. P., & Hedger. (2013). *Working Paper 380: Linking Public Financial Management Dimensions to Development Priorities*,. London: ODI.
- Wildavsky, A., Caiden, N., & Oleh: Suraji, S. (2012). *Dinamika Proses Politik Anggaran*. Yogyakarta: Metapena Consultindo.

BAB II.

KERANGKA KOLABORASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

A. Model Tata Kelola Kolabratif

Akhir tahun 1990-an berkembang wacana *collaborative governance*, dimana pemangku kepentingan sektor publik dan sektor privat secara kolktif dengan lembaga publik terlibat berama membangun keputusan bersama yang berorientasi pada konsensus, dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau manajemen publik. Definisi ini menekankan pada 6 kriteria, yaitu: (i) forum diinisiasi oleh lembaga publik; (ii) partisipan dalam forum itu melibatkan aktor non pemerintah; (iii) partisipan terlibat secara langsung dalam pembuatan keputusan tidak dimintai pendapat oleh lembaga publik; (iv) forum dibentuk secara aformal dan ada pertemuan reguler; (v) forum bertujuan membuat keputusan melalui konsensus; (vi) fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2007). *Governance* merujuk pada tindakan pengaturan dan pemerintahan, baik di sektor publik dan privat, sebagai suatu

No	Regulasi	Bagian yang Merujuk CSR
		<i>Bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.”</i>
10	Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	

Sumber: Identifikasi data sekunder, 2018

REFERENSI

- Aaken, D. v., Splitter, V., & Seidl, D. (2012). Why Do Corporate Actors Engage in Pro-Social Behavior? A Bourdieusian Perspective on Corporate Social Responsibility. -, -.
- Amadi, B. A. (2012). *Poverty Alleviation through Corporate Social Responsibility in Niger Delta..* Nigeria: Asian Social Science 8 (4), DOI.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice* Oxford University,. *The Journal of Public Administration Research and Theory.*, -.
- Arnold, D., & Valentin, A. (2013). Corporate social responsibility at the base of the pyramid. *Journal of Business Research* 66 : Bryson, John M., and Barbara C., 1904-1914.

- Baden, D., & Harwood, I. (2013). Terminology matters: a critical exploration of corporate social responsibility terms. *Journal of Business Ethics, Vol 116 No 3*, 615-627.
- Beschorner, T., Hajduk, T., & Simeonov, S. (2013). *Corporate Responsibility in Europe Government Involvement in Sector-specific Initiatives*. -: the Deutsche Nationalbibliothek, Verlag Bertelsmann Stiftung.
- Bondy, K. M. (2012). An Institution of Corporate Social Responsibility (CSR) in Multi-National Corporations (MNCs): Form and Implications, *Bus Ethics*,. *Springer Science+Business Media B.V.*, -.
- Bryson, J. M., & Crosby, B. C. (2008). Failing into cross-sector collaboration successfully. In *Big ideas in collaborative public management*. -, 55-78.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for *Collaborative Governance*. *Oxford University: The Journal of Public Administration Research and Theory*, -.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. J. (2012). An interactive framework for *collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research & Theory Vol 22*, 1-29.
- Fransen, & L. Burgoo, B. (2013). Privatizing or Socializing Corporate Responsibility Business Participation in Voluntary Programs. *Business & Society Vol. 53 No 4*, 583-619.
- Groza, M., Pronschinske, M., & Walker, M. (2011). Perceived organizational motives and consumer responses to proactive and reactive CSR. *Journal of Business Ethics Vol. 102 No. 4*, 639-652.

- Hudon, & Sandberg. (2013). The ethical crisis in microfinance: Issues, findings, and implications. *Business Ethics Quarterly Vol 23 No 4*, -.
- IOB. (2013). *Public-Private Partnerships in developing countries: A systematic literature review*. Netherlands: -.
- O'Leary, Rosemary, Bingham, L. B., & Gerard, C. (2006). Special issue on *collaborative* public management. *Public Administration Review Vol 66*, -.
- Poruthiyil, P. V. (2013). Weaning Business Ethics from Strategic Economism: The Development Ethics Perspective. *Journal of Business Ethics*, 1-15.
- Scherer, & Palazzo. (2011). The New Political Role of Business in a Globalized World – A Review of a New Perspective on CSR and its Implications for the Firm, *Governance*, and Democracy. *Journal of Management Studies Vol 48*, 899-931.
- Torugsa, N. A., O'donohue, W., & Hecker, R. (2013). Proactive CSR: an empirical analysis of the role of its economic, social and environmental dimensions on the association between capabilities and performance. *Journal of Business Ethics, Vol 115 No 2*, 383-402.
- Vives, A. (2004). The role of multilateral development institutions in fostering corporate social responsibility. *Development Vol 47 No 3*, 45–52.
- Wettstein, A. (2012). A conceptual frame model for the analysis of aggression in social interactions. *Journal of Social, Evolutionary, and Cultural Psychology JSEC Vol 6 No 2*, 141-157.

BAB III.

PATOLOGI AKUNTABILITAS SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

A. Pengarusutamaan *Pro-Poor* dalam Perencanaan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin berbasis Wilayah menyebutkan bahwa upaya penanganan kemiskinan bertujuan supaya terpenuhinya (i) Kebutuhan Dasar, (ii) meningkatnya kapasitas dan berkembangnya kemampuan dasar, (iii) meningkatnya kemampuan berusaha. Idakwoji dalam Aminu dan Onimisi (2014) menyebutkan bahwa konsep kemiskinan adalah multidimensional mencakup gejala ekonomi, sosial, dan politik. Perspektif ekonomi mengatakan kemiskinan sebagai kekurangan material yang diukur dari rendahnya pendapatan, sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar. Dari pandangan sosial kemiskinan mencerminkan status yang rendah, kurang terhormat secara sosial, dan rentan termarginalkan. Dari pandangan politik, kemiskinan nampak dari kurangnya akses memasuki area kekuatan politik dan kurangnya akses pada pembuatan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya publik. Mengacu pada varian pandangan para ahli tentang

profesi dan gender aktivis masyarakat dengan bentuk-bentuk patologi auntabilitas sosial dalam program penanggulangan kemiskinan.

Kotribusi praktis kajian ini adalah memberikan saran penelitian ini, pertama perlu diimplementasikan data integratif yang disusun dari partisipasi warga melalui uji publik hingga tingkat Rukun Tetangga. Kedua, indikator penilai untuk menentukan kriteria kelompok sasaran penerima program kemiskinan perlu dipublikasikan secara transparan melalui berbagai media, sehingga membuka peluang akses monitoring dan kontrol publik berbasis masyarakat. Ketiga, data penjangkauan kelompok sasaran keluarga miskin perlu dipublikasikan secara transparan untuk mendapatkan konfirmasi dan validasi publik secara langsung. Keempat, perlu peningkatan sistem pelaporan pengaduan masyarakat melalui peningkatan efektivitas Pos Pengaduan Masyarakat (Posdumas) di tingkat kelurahan dan di tingkat kecamatan.

REFERENSI

- Aminu, I., & Onimisi, T. (2014). Policy Implementation and The Challenges of Poverty Alleviation in Nigeria,. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol 3 No 4, 295-300.
- Anger, B. (2000). Poverty Eradication, Millennium Development Goals and Sustainable Development in Nigeria. *Journal of Sustainable Development Vol. 3 No. 4*, 138-141.
- Harmon, M. M. (1995). *Responsibility as Paradox: A Critique of Rational Discourse on Government*,.
- Islamy, M. I. (2011). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*.. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moges, A. (2013). Economic Growth, Inequality and Poverty in Developing Countries: Policy Issues and Challenges,. *The International Journal of Economic Policy Studies*, Vol 8, -.
- Muo, I. (2007). *Poverty: The Challenges, The Imperatives*, Zenith Economic Quarterly. -: -.
- Nkwede, J. O. (2013). Approaches for Poverty Alleviation and Sustainable Development in Nigeria: A Study of Ebonyi State Community Based Poverty Reduction Agency (EB-CPRA),. *International Journal of Social Science Studies* Vol. 2, No. 1, -.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*.. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Obadan, M. (2001). Poverty Reduction in Nigeria:The Way Forward. *CBN Economic and Financial Review*, Vol. 39, No.4, -.
- Roberts, N. (2002). Keeping Public Officials Accountable through Dialogue: Resolving the Accountability Paradox. *Public Administration Review* Vol. 62 No. 6, 658-669

BAB IV.

PEMERINTAHAN LOKAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan masalah global. Hampir setiap negara di dunia menempatkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas pembangunan. Menurut United Nations (2007:46), tantangan kuncinya adalah bagaimana agar pertumbuhan mampu berimplikasi kepada pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan adalah *pro-poor* jika menggunakan aset dari yang lemah atau miskin. Mendukung bidang pekerjaan si lemah/miskin dan di area dimana si lemah/miskin tinggal atau hidup. Tersirat bahwa kebijakan terutama menekankan kepada sektor pertanian dan pembangunan masyarakat desa.

Pendapat United Nations tersebut sangat beralasan. Realitas menunjukkan, desa merupakan kantong utama kemiskinan masyarakat, dari dulu sampai dengan sekarang terutama di negara-negara berkembang. Dan desa identik dengan penduduk yang bercocok tanam atau menggantungkan hidup di sektor pertanian.

Daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan dalam hal tingkat kesejahteraan penduduk, ketersediaan prasarana dan tingkat produktivitas pertanian, pendidikan, dan derajat kesehatan. Padahal sekitar 65% jumlah penduduk hidup di daerah pedesaan, sedangkan jumlah penduduk yang menetap di daerah perkotaan hanya kurang lebih 35% (Adisasmita, 2006:1).

Terdapat dikotomi desa-kota. Di satu sisi, terkandung unsur kaya, industrialisasi, status yang tinggi; di sisi lain melekat label miskin, pertanian, dan status pingiran yang rendah. Penduduk miskin di Indonesia selalu didominasi oleh penduduk desa. Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang jauh lebih besar, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan juga lebih parah daripada di daerah perkotaan. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Kearifan Kemiskinan di daerah pedesaan jauh lebih tinggi dari pada perkotaan.

Penanggulangan kemiskinan di tataran lokal dinilai strategis. Selain secara kuantitas dan kualitas kemiskinan di tingkat lokal sangat memprihatinkan, penyelesaian kemiskinan atau pembangunan yang dimulai dari bawah menurut banyak referensi dianggap tepat. Sehingga muncul banyak istilah, seperti membangun dari desa, membangun dari pingiran, dan sebagainya.

B. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pendefinisian kemiskinan relatif mudah ditemukan. Pengertian mengenai kemiskinan demikian beragam dengan berbagai perspektifnya. Bappenas mengartikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang/sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan,

Ketiga, penanggulangan kemiskinan desa bukan perkara mudah dan murah. Harus ada langkah konkret dari pengambil kebijakan di pemerintah tingkat atas dan *stakeholder* desa yang lain untuk memberikan peluang bagi desa untuk membangun dan kesempatan masyarakat untuk berdaya, antara lain melalui pengalokasian sumber daya yang memadai bagi desa dan masyarakat desa. Keempat, UU Nomor 6 tahun 2014 memberikan harapan baru bagi penguatan kelembagaan pemerintah desa. Peluang itu harus dimanfaatkan lembaga pemerintah desa dengan cara memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Kelima, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi institusi yang diandalkan untuk ikut berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan desa. Sehingga, desa perlu membentuk dan mengembangkan BUMDes sebagai pilar ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi desa dan masyarakat desa.

REFERENSI

- Adamson, Dave. 2010. Community Empowerment Identifying the Barriers to “Purposeful” Citizen Participation, *International Journal of Sociology and Social Policy*. Vol. 30, No. 3/4, 2010, pp. 114-126
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Anggara, Sahya, dan Ii Sumantri, 2016, *Administrasi Pembangunan, Teori dan Praktek*, Bandung: Pustaka Setia
- Budiati, Lilin, 2014, *Good Governance dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Friedmann, John, 1979, "Urban Poverty in Latin America, Some Theoretical Considerations", *Development Dialogue*, Vol. 1, April 1979, Dag Hammarskjold Foundation, Upsala
- Narayan, Deepa, 2002, *Empowerment and Poverty Reduction: A Source book*, Washington, DC: PREM - The World Bank
- Nurcholis, H., Drajat T.K, dan Siti Aisyah, 2016, *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota.*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sairin, Sjafrin, 2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia, Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Smith, Julia L., 2008, A Critical Appreciation of The "Bottom-Up" Approach to Sustainable Water Management: Embracing Complexity Rather Than Desirability, *Local Environment Journal*, Vol. 13, No. 4, pp. 353-366
- Soemardjan, Selo, 1984, "Kemiskinan Struktural dan Pembangunan," dalam Selo Soemardjan, Alfian, dan Mely G. Tan (penyunting), *Kemiskinan Struktural, Suatu Bunga Rampai*, Jakarta: PT. Sangkala Pulsar
- Suharto, Didik Gunawan, 2016, *Membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No. 5/1979, UU No. 22/1999, & UU No. 32/2004 serta Perspektif UU No. 6/2014)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Supriatna, Tjahya, 2000, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Theresia, Aprillia, Krisnha S. Andini, Prima G.P Nugraha, dan Totok Mardikanto, 2014, *Pembangunan Berbasis*

Masyarakat, Acuan bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat, Bandung: Alfabeta

United Nations, 2007, *Governance for the Millenium Development Goals: Core Issues and Good Practices*, New York: United Nations Publication

Welsh, Rick, 2009, "Farm and Market Structure, Industrial Regulation and Rural Community Welfare: Conceptual and Methodological Issues", *Agric Hum Values* (2009) 26: 21-28

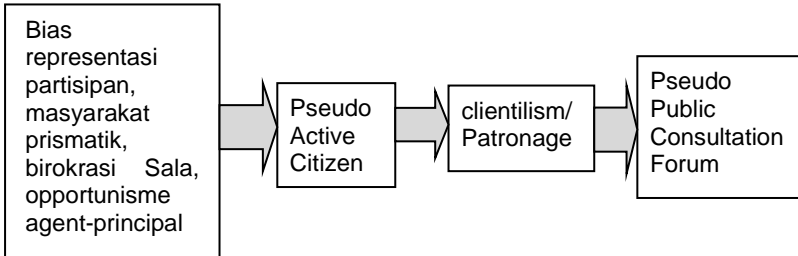
Wrihatnolo, Randy R., dan Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2007, *Manajemen Pemberdayaan, sebuah pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

BAB V

PERAN AKTIVIS MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMISKINAN DAERAH: KOMODIFIKASI?

Active citizen merepresentasikan kemampuan warga secara individual maupun kelompok untuk memperjuangkan tiga domain isu yaitu: (a) partisipasi warga memberikan kontrol kepada pemerintah dalam aksi kolektif; (b) mendorong pembangunan berbasis hak dasar warga (*right based development*); (c) pelibatan warga pada proses politik untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif (Green 2008: 12, 19; Clarke and Missingham, Dalton, 2006, Peter P. Houtzager & Arnab K. Acharya).

Pentingnya peran *active citizen* diyakini meningkatkan efektivitas dan responsibilitas pemerintahan melalui negosiasi dan pernyataan suara warga. Mereka adalah warga yang melekat informasi dan mampu mengorganisir diri untuk mempengaruhi proses kebijakan pemerintah. *Active citizen* mengangkat isu promosi harapan publik dan pelibatan partisipasi warga dalam proses kebijakan (Brynard, 2008, Houtzager & Acharya, 2010). *Active citizen* juga diyakini meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial dalam penganggaran publik sehingga dapat menekan risiko penyimpangan penggunaan anggaran publik untuk kepentingan



Source: Daa Analysis (2015)

Gambar 5.1. *The Cause-Effect Active Citizen-Klientilism/ Patronage Paradox*

Berdasar hasil penelitian di kota Surakarta ini, kebutuhan kajian selanjutnya adalah diperlukannya bagaimana meningkatkan kualitas *active citizen* sehingga sehingga mampu mengendalikan forum konsultasi publik sebagai ruang otonomi warga melakukan monitoring dan kontrol. Dengan kata lain, bagaimana menggeser wacana akuntabilitas sosial ke arah accountability as answerability sesuai preferensi nilai kepublikan warga.

REFERENSI

- Ackerman, J. (2005). *Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual Discussion*, *Social Development Paper 82, March*,. Washington DC.: -.
- Adesopo, A. (2011). Inventing Participatory Planning and Budgeting for Participatory Local *Governance* in Nigeria,. *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 2 No. 7, -.

- Akman, A. (2012). Beyond the Objectivist Conception of Civil Society: Social Actors, Civility and Self-Limitation., *Political Studies Association, 2012, Vol. 60 (2),*, 321-340.
- ANSA-EAP. (2012). *Social Accountability Perspectives and Practices in East Asia and the Pacific, Social Accountability Stocktaking Report- Indonesia, Manila, Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific.* -: ANSA-EAP.
- Björkman, M., & J. Svensson. (2009). Power to the People: Evidence from a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda., *Quarterly Journal of Economics 124 (2),*, 735-769.
- Brinkerhoff, D., & Wetterberg, A. (2015). *Gauging the Effects of Social Accountability on Services, Governance, and Citizen Empowerment, Public Administration Review,*. -: -.
- Brynard. (2009). Civic Engagement and Public Policy Implementation: The Child Support. *Journal of Public Administration, Vol 44 No 2,* -.
- Camargo, C., & Jacobs, E. (2013). *Social Accountability and Its Conceptual Challenges: An Analytical Framework, Working Paper Series No. 16.*, Switzerland: The Basel Institute on Governance is an Associated Institute of the University of Basel.
- Clarke, M., & Bruce Missingham. (2009). Active Citizenship and Social Accountability., *Development in Practice, Volume 19, Number 8,* -.
- Cooke, & Kothari. (2001). *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.

- Cornwall, A. (2008). Unpacking ‘participation’: models, meanings and practices,. *Community Development Journal*, vol. 43:3, 269-283.
- Cox, J. (2009). Active citizenship or passive clientelism? Accountability and development in Solomon Islands. *Development in Practice*, vol:19:8, 964-980.
- Dalton, R. J. (2006). *Citizen politics: Public opinion and political parties in advanced industrial democracies (4th ed.)*.. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Davies, A., & Simon, J. (2012). *The value and role of citizen engagement in social innovation. A deliverable of the project: “The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (TEPSIE)*. Brussels : European Commission: DG Research.
- Eko, S. (2008). *Pro Poor Budgeting: Politik Baru Reformasi Anggaran Daerah untuk Pengurangan Kemiskinan*. Yogyakarta: IRE Institute for Research.
- Erkkila, T. (2007). *Governance and Accountability a Shift in Conceptualisation*.. *Public Administration Quarterly*, Vol. 31, No. 1/2, 1-38.
- Fox, A. (2015). Social Accountability: What Does the Evidence Really Say?.. *World Development Vol. 72*, 346-361.
- Fung, A. (2003). Survey Article: Recipes for Public Spheres: Eight Institutional Design Choices and Their Consequences. *The Journal of Political Philosophy vol:11(3)*, 338-367.

- Goetz, A. M., & Gaventa, J. (2001). *Bringing Citizen Voice and Client Focus into Service Delivery, IDS Working Paper No. 138*. Brighton: Institute of Development Studies.
- Goetz, A. M., & Jenkins. (2001). Hybrid Forms of Accountability: Citizen Engagement in Institutions of Public-Sector Oversight in India,. *Public Management Review, Vol. 3, No. 3*, 363-383.
- Green. (2009). *From Poverty to Power: How Active Citizens and Effective States can Change the World*, Oxford: Oxfam International. *Development in Practice Vol. 19 No. 8*, -.
- Greiling, D., & Spraul, K. (2010). Accountability and the Challenges Information Disclosure,. *Public Administration Quarterly, Vol. 34, No. 3 (Fall)*, 338-377.
- Hikmat, H. (2004). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Humaniora.
- Hong, S. (2015). *Citizen Participation in Budgeting: A Tradeoff Between Knowledge and Inclusiveness. Public Administration Review*,. -: -.
- Houtzager, P. P., & Acharya, A. K. (2010). *Associations, active citizenship, and the quality of democracy in Brazil and Mexico*. -: -.
- Jensen, M. (1998). *Self Interest, Altruism, Incentives, and Agency Theory, Michael C. Jensen, Foundation of Organizational Strategy*,. -: Harvard University Press,.
- Kabeer, N. (2005). *Growing Citizenship from the Grass-Roots: Nijera Kori and Social Mobilization in Bangladesh, Inclusive Citizenship: Meanings and Expressions, N. Kabeer (ed.)*. London: Zed Books.

- Klein, A. Y. (2011). *Concepts and Principles of Democratic Governance and Accountability*. Uganda: Konrad-Adenauer-Stiftung.
- Lehning, A. J. (2016). Political Science Perspectives on Poverty. *Journal of Human Behavior in the Social Environment* Vol. 6, 87-103.
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). Social Accountability: An Introduction to Concept and Emerging Practice.. *Social Development Papers, Participation and Public Engagement* No. 76, -.
- Merritt. Madison, W. J.-2. (2013). Specifying a Multi-Dimensional Model of Publicness: Toward a Comprehensive Perspective. *Konverensi 12th Public Management Research Conference* (pp. -). Madison, Wisconsin: -.
- Mitnick, B. M. (2013). *Origin of the Theory of Agency: An Account By One of the Theory's Originators*. -: -.
- Mulgan, G. (2008). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good*. Oxford: Oxford University Press.
- Mulgan, R. (2000). *Accountability: An Ever Expanding Concept?*, *Public Administration*. -: -.
- Niraja, G. (2008). New Directions in Theorizing Social Accountability? *IDS Bulletin Volume 38, Issue 6*, 105-112.
- Novak. (2007). Accountability to Whom?., *in Economic and Political Weekly*, Vol. 42, No. 30, 3172-3177.
- Peruzzotti, E., & Smulovitz, C. (2006). *Enforcing the Rule of Law: Social Accountability in New Latin American Democracies*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

- Schillemans, T. (2013). *The Public Accountability Review A Meta-Analysis of Public Accountability Research in Six Academic Disciplines.* -: Utrecht University School of Governance.
- Sirker, K., & Cosic, S. (2007). *Empowering the Marginalized: Case Studies of Social Accountability Initiatives in Asia.* Washington: The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank.
- Stapenhurst, R., & M. O'Brien. (2008). *Accountability in Governance, World Bank PREM Note No 4.* Washington DC: The World Bank,.
- Tsai, L. (2007). *Accountability without Democracy.* New York: Cambridge University Press.
- Wahyunengseh, R. D. (2016). *Patologi Akuntabilitas Sosial (Studi Kasus dalam Proses Perencanaan Penganggaran Daerah di Kota Surakarta dan Kota Magelang).* Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada: -.
- Yang, K., & K. Callahan. (2007). Citizen Involvement Efforts and Bureaucratic Responsiveness: Participatory Values, Stakeholder Pressures, and Administrative Practicality, *Public Administration Review, Vol. 67, No. 2 (March-April),* 249-264.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN¹

A. Pendahuluan

Isu kemiskinan menjadi sebuah hal yang semakin krusial. Tidak bisa dipungkiri permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah internasional. Publikasi yang dirilis Bank Dunia dalam laporan *Poverty and Shared Prosperity* akhir tahun 2016 menunjukkan 10,7% dari populasi global berada dalam jurang kemiskinan. Tercatat 767 juta orang hidup di bawah garis internasional kemiskinan (Laucereno, 2017). Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi *problem* di berbagai negara di dunia ini, maka agenda pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) menyatakan *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia.

¹ Ditulis oleh Yunita Mega Kristiani dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Administrasi Publik, FISIP Universitas Sebelas Maret, 12 Juli 2018

Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut adalah diperlukan meta analisis penelitian tentang penyimpangan atau permasalahan yang ditemui dalam program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, ditinjau dari aspek gender, kelompok usia, dan kwilayah desa-kota.

REFERENSI

- Adenansi. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri. *PROSIDING KS : Riset & PKM* (pp. 301-444). -: -.
- Ahmadi, R. (2012). Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Pendekatan Modal Manusia (Studi Layanan Publik tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin yang Diselenggarakan oleh BPM-KB dan Posko 100 di Kota Surabaya).. *Jurnal Administrasi Publik, Vol: 10(2),*, 16-31.
- Badan Pusat Statistik, B. (2018, Juni 10). *bps.go.id*. Retrieved from *bps.go.id*:
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Diatmika, I. G. (2017). Strategy of poverty alleviation in Klungkung regency : Evidence from Bali province. *International Journal of Economic Perspectives, Vol: 11(1),* 442-452.
- Diwakar, P. G. (2008). Empowering the rural poor through EO products and services - An impact assessment. *Acta Astronautica, Vol: 63,* 551-559.

- Gordon, E. (2013). Under-served and un-deserving : Youth empowerment programs, poverty discourses and subject formation.. *Geoforum, Vol: 50*, 107-116.
- Kuncoro, M. (1997). *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Laucereno. (2018, Mei 10). *finance.detik.com*. Retrieved from <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3707627/berapa-banyak-orang-miskin-di-muka-bumi-ini>
- Maisaroh, S., & Sukhemi. (2011). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Budaya Kewirausahaan Untuk Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan.,. *JEJAK, Vol: 4(1)*, 23-33.
- Murdiansyah, I. (2014). Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang). *Jurnal WIGA, Vol: 4(1)*, 71-92.
- Muslim, A. (2017). Analisis Kegagalan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Masyarakat Miskin (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). pp. 79-87. *Jurnal Penyuluhan, Vol: 13(1)*, 79-87.
- Nana, I. S. (2009). *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Nasila, J. W. (2013). Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM)), Studi Tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Mamboro Kecamatan Palu Utara Kota Palu. *Jurnal Akadmeica Fisip Untad, Vol: 05(02)*, 1253-1264.

- Prasetyo, P. E., & Maisaroh, S. (2009). Model Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Trikonomika*, Vol: 8(2), 103-116.
- Sutikno, E. S. (2010). Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol :11(1), 135-147.
- Suyanto, & P., B. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Sejahtera (Studi Kasus di Kabupaten Sragen). *SOSIO KONSEPSIA*, Vol: 5(01), 340-354.
- Trommlerova, S. K. (2015). Determinants of Empowerment in a Capability - Based Poverty Approach : Evidance from The Gambia.. *World Development*, Vol: 66, 1-15.
- Wahyunengseh, R. D., Budiarjo, & Ansoriyah, F. (2017). Social Accountability Pathology in Local Poverty Coping Policy.. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol: 167, 208-212.
- Wijaya, M. (2010). Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal of Rural and Development*, Vol: 1(1), 1-9.
- Zain, I. W. (2017). Regional action plan handling of social welfare problem in nganjuk regency.. *The 2nd International Joint Conference on Science and Technology (IJCST)*, 1-6.

BAB VII

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN²

A. Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu utama negara-bangsa di dunia dan setiap negara mencoba untuk mencari solusi dan solusi itu melahirkan berbagai kebijakan (Suharto, 2013; Nurhasim, Rahman, Cahyono, & Wiratama, 2014). Dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development* menempatkan isu kemiskinan (*poverty*) sebagai target pertama dalam pembangunan berkelanjutan yang berarti bahwa pada tahun tersebut dunia berkomitmen untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan pada tataran global. Pemerintah juga tengah mengupayakan agar angka kemiskinan nasional terus menurun hingga mencapai *single digit* di kisaran 7,0-8,0 persen pada akhir tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam lembaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Akankah target tersebut tercapai? Pasalnya rilis terbaru *World Bank* (Bank Dunia) menyebut bahwa estimasi kemiskinan dunia

² Ditulis oleh Subekhan dan Rutiana Dwi Wahyunengseh, pernah dipresentasikan dalam Seminar Nasional Administrasi Publik, FISIP Universitas Sebelas Maret, 12 Juli 2018

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik.(2018, Januari 3). *Badan Pusat Statistik*. Dipetik Juni 10, 2018, dari www.bps.go.id: <https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. (2015), Buku I Agenda Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- Departement of Economics and Social Affairs of United Nations. (2015, Oktober 21). *Departement of Economics and Social Affairs of United Nations*. Dipetik Mei, 06, 2018, dari sustainabledevelopment.un.org: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.
- Dunn, W. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gopal, P. S., & Malek, N. M. (2015). Breaking Away from the Cycle of Poverty: The Case of Malaysian Poor. *The Social Science Journal*, Vol. 52, h. 34–39.
- Keban, Y. T. (20014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Muktiali, M. (2018). Policy Analysis of Poverty Alleviation in Semarang City Using Spatial and Sectoral Approach. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 123, h. 1-12.

- Nugroho, R. (2015). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhasim, M., Rahman, A. R., Cahyono, H., & Wiratama, R. T. (2014). *Model Kebijakan yang Memihak Kelompok/ Orang Miskin Berbasis Good Governance*. Jakarta: LIPI Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Rahim, A. A., & Suryaningsih, M. (2016). Implementasi Kebijakan Kartu Jakarta Pintar di SMP Negeri 144 Jakarta. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 5, No. 4, h. 1-14.
- Rahmawati, Sulistiyowati, & Herawati, R. N. (2016). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2010 – 2014 (Studi Penelitian di Universitas Diponegoro dan Universitas Negeri Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 5, No. 4, h. 1-17
- Riska, I. A., & Rostyaningsih, D. (2018). Implementasi Program Indonesia Pintar pada Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP 3 Satu Atap Gebog Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 7, No. 2, h. 1-23.
- Sinulingga, R. (2014). Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa SMA Negeri di Kota Binjai. *Perspektif*, Vol. 7, No. 1, h. 254-270.
- Smith, K.B., Larimer, C.W. (2009). *The Public Policy Theory Primer*. USA: Westview Press

- Suharto, E. (2013). *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Swistantoro. (2014). *Pembasmian Kemiskinan: Perspektif Sosiologi - Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Toha, M. (1984). *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali.
- Wahyunengseh, R.D., Hartanto, R.V.P., Hastjarjo, S. (2012). *Public Governance*. UNS Press.
- Wahyunengseh, R. D., Budiarjo. & Ansoriyah, F. (2017). *Social Accountability Pathology in Local Poverty Coping Policy. In Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 167, pp. 208-212.*
- Wahyunengseh, R.D., Mulyono, A. (2016). ICT and Pseudo E-Governance Trap — A Case Study of “SMS Pandan” and “ULAS” in Surakarta City. In ICoSaPS Conference Proceedings The 3rd International Conference on Social and Political Science “The Impact of Information Technology, Volume 2017. KnE Social Sciences, indexing by Web of Science.
- Wahyunengseh, R. D., Julianingrum, M., Hastjarjo, S., & Mulyanto. (2017). Patologi Akuntabilitas Sosial dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. *Spirit Publik* Vol, 12, No. 2, h. 32-4.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Center of Academic Publishing Services.
- World Bank. (2018, April 11). *World Bank*. Dipetik Juni 10, 2018, dari www.worldbank.org: <http://www.worldbank.org/en/-topic/poverty/overview>

Zhoua, Y., Guoa, Y., Liua, Y., Wua, W., & Lia, Y. (2018). Targeted Poverty Alleviation and Land Policy Innovation: Some Practice and Policy Implications from China. *Land Use Policy*, Vol. 74, h. 53–65.

BAB VIII.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

UNTUK KEMISKINAN ANAK DI ERA 4.0

A. Pendahuluan

Isu kemiskinan anak penting dikaji karena berdampak pada masa depan bangsa, secara khusus di era 4.0, dimana kehadiran teknologi informasi banyak menggeser pekerjaan buruh dengan tenaga robot dan kecerdasan buatan, serta menggeser usaha retail menjadi toko online. Perubahan ini menggeser peluang kerja bagi keluarga miskin yang biasanya melakukan fungsi kerja buruh dan pelayan toko.

Terkait dengan hal ini, maka kebijakan penanggulangan kemiskinan responsif anak mendesak untuk dilembagakan. Kebijakan kemiskinan responsif anak hanya dapat dihasilkan jika aktor penyusun kebijakan dan implementornya memiliki sensitivitas khusus tentang isu kemiskinan anak. Oleh karena itu artikel ini menyajikan analisis wacana sensitivitas kemiskinan anak pada aktor-aktor kebijakan di salah satu kota di Indonesia. Dalam era *democratic governance*, aktor kebijakan bukanlah domain pemerintah semata, namun juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya, diantaranya dunia usaha. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang visioner, artinya bersifat antisipatif terhadap tantangan jaman sebagai variabel dinamis kebijakan. Era industri 4.0 merupakan salah satu tantangan jaman yang perlu diadaptasi

REFERENSI

- Afridi, A. (2011). Social networks: their role in addressing poverty. *In JRF programme paper Poverty and Ethnicity*. York, UK: Joseph Rowntree Foundation.
- Aminu and Onimisi, T. (2014). Policy Implementation and The Challenges of Poverty Alleviation in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 3(4)*, 295-300.
- Ansell, C. and Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *The Journal of Public Administration Research and Theory Vol. 8(4)*, 543-571.
- Attree, P. (2006). The Social Costs of Child Poverty: A Systematic Review of the Qualitative Evidence. *Children & Society Vol. -(20)*, 54-66.
- Bali, A.S., Capano, G. & Ramesh, M. (2019). Anticipating and designing for policy effectiveness. *Policy and Society Vol. 38(1)*, 1-13.
- Carr, C. & A. Hayes, R. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Atlantic Journal of Communication Vol. 23(1)*, 46-65.
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. (2011). An integrative framework for *collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research & Theory Vol. 22(1)*, 1-29.
- Fallis, D. (2015). What Is Disinformation? *Library Trends Vol. 63(3)*, 401-426.
- Field, J. (2014). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.

- Fry, Ch. E., Langley, K., Shelton, K. H. (2017). A systematic review of cognitive functioning among young people who have experienced homelessness, foster care, or poverty. *Child Neuropsychology Vol. 23*(8), 907-834.
- Giglietto, F., Iannelli, L., Rossi, L., & Valeriani, A. (2016). *Fakes, news and the election: A new taxonomy for the study of misleading information within the hybrid media system*. Urbino, Italy: SSRN.
- Gordon, D and Spicker, P. (1998). *Definitions of Absolute and Overall Poverty, The International*. -:-.
- Habibi, L., Farpour, H. R., & Pirzad, R. (2017). *How Does Social Media Affect Health Communication?* -:-.
- Hudson, B., Hunter, D. & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice Vol. 2*(1), 1-14.
- International Journal of Brain and Cognitive Sciences Vol. 6*(4), 74-79.
- Indonesia Ministry of National Development Planning and the United Nations Children's Fund. (2017). *SDG Baseline Report on Children in Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS and UNICEF.
- Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons Vol. 53*(1), 59–68.
- Kasali, R. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Katadata. (2018). *Berapa jumlah pengguna internet di Indonesia*. Indonesia: Katadata. Retrieved on May 20, 2018, from

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/20/berapa-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia>.

- Kessey, K. D. (2013). Global poverty reduction policy and implementation strategies at local level, integrated planning options and challenges in a developing country, Ghana. *Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities Vol. 1*(6), 076-085.
- Li, Y., Wang, X., Lin, X., & Hajli, M. (2018). Seeking and sharing health information on social media: A net valence model and cross-cultural comparison. *Technological Forecasting and Social Change Vol. 126*(1), 28-40.
- Moges, A. G. (2013). Economic Growth, Inequality and Poverty in Developing Countries: Policy Issues and Challenges. *The International Journal of Economic Policy Studies Vol. 8*(41), 41-66.
- Nkwede, J. O. (2014). Approaches for Poverty Alleviation and Sustainable Development in Nigeria: A Study of Ebonyi State Community Based Poverty Reduction Agency (EB-CPRA). *International Journal of Social Science Studies Vol. 2*(1), 153-163.
- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice Vol. 1*(1), 1-11.
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community-Social Capital and Public Life. *American Prospect Vol. 4*(13), 35-42.
- Sanberg, J. (2015). Evidence-based Policymaking? Revisiting the “Known,” the Assumed and the Promoted in New Social Development Policy. *Journal of Poverty Alleviation and International Development Vol. 6*(2), 47-80.

- Sung, T. K. (2018). Industri 4.0: A Korean Perspective. *Technological Forecasting and Social Change Journal, Elsevier Vol. 132(C)*, 40-45.
- Usman, Sunyoto. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wagner, T. (2008). *The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach The New Survival Skills Our Children Need— And What We Can Do About It and Change Leadership: A Practical Guide to Transforming Our Schools*. New York: Basic Books.
- United Nations Children's Fund. (2017). *Children in Indonesia: An analysis of poverty, mobility and multidimensional deprivation*. Jakarta: UNICEF.
- Wahyunengseh, R.D., Hastjarjo, S., Suharto, D.G. (2018). Social Media and Poverty: Paradoxes of Communicating Poverty Issues on Social Media. *International Journal of Administrative Science & Organization, Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 25(3)*, 120-127.

BAB IX.

PERAN BROKER INFORMASI MENJEMBATANI KESENJANGAN DIGITAL KELOMPOK MISKIN DI ERA PEMERINTAHAN DIGITAL

A. Pendahuluan

Artikel ini membahas tentang masalah resiko komunikasi kebijakan publik berbasis teknologi informasi di era *government 5.0* bagi kelompok miskin. Era *government 5.0* adalah tata kelola pemerintahan di era *society 5.0*. Istilah *society 5.0* dipahami sebagai tahapan kelima setelah perkebangan tatanan kemasyarakatan, yang diklasifikasikan menjadi era: (i) berburu, (ii) bertanam, (iii) industri, dan (iv) masyarakat informasi. *Society 5.0* menggambarkan suatu kondisi dimana masyarakat leluasa mengejar berbagai nilai secara kreatif untuk mengatasi berbagai hambatan dan keterbatasan yang ada. Pelaku utama di *Society 5.0* adalah manusia, yang berkreasi dengan memanfaatkan teknologi untuk memecahkan isu-isu sosial sembari menjaga harmoni dengan alam [1].

information broker. Forum komunikasi dan diskusi online tersebut perlu ditindaklanjuti dengan olah data dan analisis feedback dari jaringan komunikasi tersebut. *Keempat*, pemerintah perlu menyediakan tempat untuk coworking space di area publik yang strategis, dilengkapi dengan jaringan internet dan device untuk membantu masalah digital divide bagi kelompok miskin.

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah perlunya *systematical review* tentang penelitian komunikasi pemerintah untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan di kalangan kelompok miskin dari perspektif *government 5.0*.

REFERENSI

- (1) Keidanren. (2018). *Society 5.0, Co-creating the future*. Retrieved from <http://www.keidanren.or.jp>
- (2) Larasati, C. (2018, December 07). Kesenjangan Digital di Indonesia Masih Tinggi. *Medcom.id*. Retrieved from <https://www.medcom.id>
- (3) Sparks, C. (2013). What is the “Digital Divide” and why is it Important? *Javnost - The Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture Vol. 20 No. 2*, 27-46. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13183222.2013.11009113>
- (4) Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Polling Indonesia. (2019). *Laporan Survei Nasional Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet 2018*. Retrieved from <https://apjii.or.id>

- (5) Alika, R. (2019, Januari 24). Kesenjangan Ekonomi Dunia Melebar Imbas Era Didital. *Dkatadata.co.id*. Retrieved from <https://katadata.co.id>
- (6) World Bank. (2016, Januari 13) *Teknologi Digital: Potensi Besar Pembangunan Belum Menjangkau Empat Miliar Orang yang Tidak Memiliki Akses Internet*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- (7) World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0671-1. Retrieved from <https://http://documents.worldbank.org>
- (8) Bahrini, R. and Qaffas, A.A. (2019). Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries. *Economies Vol. 7*(1) No. 21, 1-13, Retrieved from <https://doi.org/10.3390/economies7010021>
- (9) Njoki, M., Wabwoba, F. (2015). The Role of ICT in Social Inclusion: A Review of Literature. *International Journal of Science and Research (IJSR) Vol: 4*(12), 5-611. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- (10) Adera, E. O., et al. (2014). *ICT Pathways to Poverty Reduction: Empirical evidence from East and Southern Africa*. UK: International Development Research Centre. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3362/9781780448152>
- (11) Sanders, K., Crespo, M. J. C., and Bacha, C. H. (2011). Communicating Governments: A Three-Country Comparison of How Governments Communicate with Citizens. *The International Journal of Press/Politics Vol. 16*(4), 523-547. <https://doi.org/10.1177/1940161211418225>

- (12) Milakovich, M. E. (2014). *Digital governance and collaborative strategies for improving service quality. In KMIS 2014 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing* (pp. 109-118). -:INSTICC Press. Retrieved from <https://doi.org/10.5220/0005021001090118>
- (13) Johansson, K. M., and Raunio, T. (2019). *Government communication in a comparative perspective in Johansson, K.M. & Nygren, G. (Eds.). Close and distant: Political executive–media relations in four countries* (pp. 127-148). Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- (14) Flor, A. (2014). ICT pathways to poverty reduction: empirical evidence from East and Southern Africa. *Information Technology for Development*. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/02681102.2014.923595>
- (15) Ministry of Education, Culture, sports, Science and Technology – Japan. (2018, Juni 15). *Human Resource Development for Society 5.0 Changes to Society, Changes to Learning (Summary) Minister’s Meeting on Human Resource Development for Society Task Force on Developing Skills to Live Prosperously in the New Age*. Retrieved from http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/pdf2018/20180605_001.pdf
- (16) Bornbaum et al, (2015) Exploring the function and effectiveness of knowledge brokers as facilitators of knowledge translation in health-related settings: a systematic review and thematic analysis. *Implementation Science Vol. 10*(162), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0351-9>
- (17) Fisher, C. and Vogel, I. (2008). *Locating the power of in-between: How research brokers and intermediaries support*

- evidence based pro-poor policy and practice*. UK: The Institute of Development Studies. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- (18) Sagsan, M., and Sozen, H.C. (2010). The Brokerage Roles in The Organizational Networks and Manipulation of Information Flow. *International journal of eBusiness and eGovernment Studies Vol. 2(2)*, 41-51. Retrieved from http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/archives/2010/04h_cenk_sozen.pdf
- (19) Landis, B., et al. (2018). The Paradox of Agency: Feeling Powerful Reduces Brokerage Opportunity Recognition yet Increases Willingness to Broker. *Journal of Applied Psychology Vol. 103(8)*, 929–938, <http://dx.doi.org/10.1037/apl0000299>
- (20) Burt, R. S., Kilduff, M., & Tasselli, S. (2013). Social network analysis: Foundations and frontiers on advantage. *Annual Review of Psychology Vol. 64*, 527–547. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143828>
- (21) Prabhakaran, A., & Kalyani, K. (2014). The thumb generation: ICT application in libraries. *Journal of Library, Information and Communication Technology (JLICT) Vol. 6(1-2)*, 42-47. Retrieved from <http://www.escienceworld.in/index.php/jlict/article/view/61/61>
- (22) Kozma, R. B., & Vota, W. S. (2014). ICT in developing countries: Policies, implementation, and impact. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.). *Handbook of research on educational communications and technology* (pp. 885-894). New York: Springer. Retrieved from www.researchgate.net

- (23) Rauchfleisch, A. (2017). The public sphere as an essentially contested concept: A co-citation analysis of the last 20 years of public sphere research. *Communication and the Public Vol.* 2(1), 3–18. doi:10.1177/2057047317691054
- (24) WorldBank. (2011). The Contribution of *Government Communication Capacity to Achieving Good Governance Outcomes Commun. Gov. Account. Progr. (World Bank) Vol.-*, 1–12. Retrieved from <https://assets.publishing.service.gov.uk>
- (25) Liudmila Minaeva, L. (2019). *Government Communication in Digital Environment, International Conference on Communicative Strategies of Information Society (CSIS 2018)*, Atlantis Press. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 289, 50-53*. doi:10.2991/csis-18.2019.10. Retrieved From <https://download.atlantisspress.com/article/55913787.pdf>
- (26) Nasution, A. (2018). Poverty Measurement in BPS-Statistics Indonesia: The Actor Network Theory Approach. *Jurnal Sositologi Vol. 17(1)* (pp.154-170). Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/6313/3176>
- (27) Voeten, J., de Groot, G., de Haan, J., and Roome, N. (2013). Understanding Responsible [27] Innovation in Small Producers' Clusters in Vietnam through Actor Network Theory (ANT). *The European Journal of Development Research Vol. 27(2)*, 289–307. Retrieved from <https://doi.org/10.1057/ejdr.2014.35>
- (28) Callon, M. (1986). 'Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay', in John Law (Ed.), *Power, Action and*

Belief: A New Sociology of Knowledge Vol.-, 196-223.
London: Routledge & Kegan Paul. Retrieved from
<http://www.thetransformationsproject.co.uk/wp-content/uploads/Actor-Network-Theory.pdf>

BAB X.

KOMUNIKASI LINTAS PELAKU UNTUK SINERGITAS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: PEMBELAJARAN DARI KOTA MAGELANG

A. Latar Belakang

Di era *collaborative governance*, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggungjawab bersama pilar *governance* ABCG (Akademisi, Bisnis, *Civil society*, *Government*). Dalam teori *governance* pemerintah dituntut kemampuannya membangun dukungan kuat dalam mengelola kepentingan publik di bawah keterbatasan internal maupun eksternal. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengembangkan perspektif baru tentang perubahan peran pemerintah dalam berinteraksi dengan unsur (i) pemerintah dalam negeri; (ii) antar negara, (iii) dunia usaha; (iii) masyarakat.

Kota Magelang menempatkan isu kemiskinan sebagai prioritas pemabangunan daerah dan memiliki Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sebagai payung kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi Kota Magelang sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan

REFERENSI

- Ansell, C. and Gash, A. 2007., *Collaborative Governance in Theory and Practice* Oxford University, the Journal of Public Administration Research and Theory.
- Amadi, B.O., Abdullah, H., 2012, Poverty Alleviation through Corporate Social Responsibility in Niger Delta, Nigeria. *Asian Social Science* 8 (4), DOI: 10.5539/ass.v8n4p57
- Arnold, D.G., & Valentin, A. 2013. Corporate social responsibility at the base of the pyramid. *Journal of Business Research*, **66**:1904–14. Bryson, John M., and Barbara C. Crosby. 2008. Failing into cross-sector collaboration successfully. In *Big ideas in collaborative public management*, eds. L. B. Bingham and R. O’Leary, 55–78. Armonk, NY: M.E. Sharpe.
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. 2011. An interactive framework for *collaborative governance*. *Journal of Public Administration Research & Theory*. 22: 1 – 29. Retrieved online from <http://jpart.oxfordjournals.org> on March 13, 2012.
- Kirk Emerson, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2011, *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. Oxford University: the Journal of Public Administration Research and Theory.

DAFTAR PUSTAKA

- Adera, E. O., et al. (2014). *ICT Pathways to Poverty Reduction: Empirical evidence from East and Southern Africa*. UK: International Development Research Centre. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.3362/9781780448152>
- Afridi, A. (2011). Social networks: their role in addressing poverty. *In JRF programme paper Poverty and Ethnicity*. York, UK: Joseph Rowntree Foundation.
- Alika, R. (2019, Januari 24). Kesenjangan Ekonomi Dunia Melebar Imbas Era Didital. *Dkatadata.co.id*. Retrieved from <https://katadata.co.id>
- Aminu and Onimisi, T. (2014). Policy Implementation and The Challenges of Poverty Alleviation in Nigeria. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol. 3(4)*, 295-300.
- Ansell, C. and Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *The Journal of Public Administration Research and Theory Vol. 8(4)*, 543-571.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Polling Indonesia. (2019). *Laporan Survei Nasional Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet 2018*. Retrieved from <https://apjii.or.id>
- Attree, P. (2006). The Social Costs of Child Poverty: A Systematic Review of the Qualitative Evidence. *Children & Society Vol. -(20)*, 54-66.
- Bahrini, R. and Qaffas, A.A. (2019). Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evidence from Developing Countries. *Economies Vol. 7(1)*

No. 21, 1-13, Retrieved from <https://doi.org/10.3390/economies7010021>

- Bali, A.S., Capano, G. & Ramesh, M. (2019). Anticipating and designing for policy effectiveness. *Policy and Society Vol. 38*(1), 1-13.
- Bornbaum et al, (2015) Exploring the function and effectiveness of knowledge brokers as facilitators of knowledge translation in health-related settings: a systematic review and thematic analysis. *Implementation Science Vol. 10*(162), 1-12. <https://doi.org/10.1186/s13012-015-0351-9>
- Burt, R. S., Kilduff, M., & Tasselli, S. (2013). Social network analysis: Foundations and frontiers on advantage. *Annual Review of Psychology Vol. 64*, 527–547. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143828>
- Callon, M. (1986). ‘Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay’, in John Law (Ed.), *Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge Vol.-*, 196-223. London: Routledge & Kegan Paul. Retrieved from <http://www.thetransformationproject.co.uk/wp-content/uploads/Actor-Network-Theory.pdf>
- Carr, C. & A. Hayes, R. (2015). Social Media: Defining, Developing, and Divining. *Atlantic Journal of Communication Vol. 23*(1), 46-65.
- Emerson, K., Nabatchi, T. & Balogh, S. (2011). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research & Theory Vol. 22*(1), 1-29.
- Fallis, D. (2015). What Is Disinformation? *Library Trends Vol. 63*(3), 401-426.

- Field, J. (2014). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana Offset.
- Fisher, C. and Vogel, I. (2008). *Locating the power of in-between: How research brokers and intermediaries support evidence based pro-poor policy and practice*. UK: The Institute of Development Studies. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Flor, A. (2014). ICT pathways to poverty reduction: empirical evidence from East and Southern Africa. *Information Technology for Development*. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/02681102.2014.923595>
- Fry, Ch. E., Langley, K., Shelton, K. H. (2017). A systematic review of cognitive functioning among young people who have experienced homelessness, foster care, or poverty. *Child Neuropsychology Vol. 23*(8), 907-834.
- Giglietto, F., Iannelli, L., Rossi, L., & Valeriani, A. (2016). *Fakes, news and the election: A new taxonomy for the study of misleading information within the hybrid media system*. Urbino, Italy: SSRN.
- Glossary on Poverty*. New York, London: Zed Books
- Gordon, D and Spicker, P. (1998). *Definitions of Absolute and Overall Poverty, The International*. -:-.
- Habibi, L., Farpour, H. R., & Pirzad, R. (2017). *How Does Social Media Affect Health Communication?* -:-.
- Hudson, B., Hunter, D. & Peckham, S. (2019). Policy failure and the policy-implementation gap: can policy support programs help? *Policy Design and Practice Vol. 2*(1), 1-14.
- Indonesia Ministry of National Development Planning and the

United Nations Children's Fund. (2017). *SDG Baseline Report on Children in Indonesia*. Jakarta: BAPPENAS and UNICEF.

International Journal of Brain and Cognitive Sciences Vol. 6(4), 74-79.

Johansson, K. M., and Raunio, T. (2019). *Government communication in a comparative perspective in Johansson, K.M. & Nygren, G. (Eds.). Close and distant: Political executive-media relations in four countries* (pp. 127-148). Retrieved from <https://www.researchgate.net>

Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons* Vol. 53(1), 59–68.

Kasali, R. (2017). *Disruption*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Katadata. (2018). *Berapa jumlah pengguna internet di Indonesia*. Indonesia: Katadata. Retrieved on May 20, 2018, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/20/berapa-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia>.

Keidanren. (2018). *Society 5.0, Co-creating the future*. Retrieved from <http://www.keidanren.or.jp>

Kessey, K. D. (2013). Global poverty reduction policy and implementation strategies at local level, integrated planning options and challenges in a developing country, Ghana. *Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities* Vol. 1(6), 076-085.

Kozma, R. B., & Vota, W. S. (2014). ICT in developing countries: Policies, implementation, and impact. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.). *Handbook of*

research on educational communications and technology (pp. 885-894). New York: Springer. Retrieved from www.researchgate.net

- Landis, B., et al. (2018). The Paradox of Agency: Feeling Powerful Reduces Brokerage Opportunity Recognition yet Increases Willingness to Broker. *Journal of Applied Psychology Vol. 103*(8), 929–938, <http://dx.doi.org/10.1037/apl0000299>
- Larasati, C. (2018, December 07). Kesenjangan Digital di Indonesia Masih Tinggi. *Medcom.id*. Retrieved from <https://www.medcom.id>
- Li, Y., Wang, X., Lin, X., & Hajli, M. (2018). Seeking and sharing health information on social media: A net valence model and cross-cultural comparison. *Technological Forecasting and Social Change Vol. 126*(1),28-40.
- Liudmila Minaeva, L. (2019). *Government Communication in Digital Environment, International Conference on Communicative Strategies of Information Society (CSIS 2018)*, Atlantis Press. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 289*, 50-53. doi:10.2991/csis-18.2019.10. Retrieved From <https://download.atlantis-press.com/article/55913787.pdf>
- Milakovich, M. E. (2014). Digital governance and collaborative strategies for improving service quality. In *KMIS 2014 - Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing* (pp. 109-118). -:INSTICC Press. Retrieved from <https://doi.org/10.5220/0005021001090118>
- Ministry of Education, Culture, sports, Science and Technology – Japan. (2018, Juni 15). *Human Resource Development for*

Society 5.0 Changes to Society, Changes to Learning (Summary) Minister's Meeting on Human Resource Development for Society Task Force on Developing Skills to Live Prosperously in the New Age. Retrieved from http://www.mext.go.jp/b_menu/activity/detail/pdf2018/20180605_001.pdf

- Moges, A. G. (2013). Economic Growth, Inequality and Poverty in Developing Countries: Policy Issues and Challenges. *The International Journal of Economic Policy Studies Vol. 8*(41), 41-66.
- Nasution, A. (2018). Poverty Measurement in BPS-Statistics Indonesia: The Actor Network Theory Approach. *Jurnal Sositologi Vol. 17*(1) (pp.154-170). Retrieved from <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/6313/3176>
- Njoki, M., Wabwoba, F. (2015). The Role of ICT in Social Inclusion: A Review of Literature. *International Journal of Science and Research (IJSR) Vol: 4*(12), 5-611. Retrieved from <https://www.researchgate.net>
- Nkwede, J. O. (2014). Approaches for Poverty Alleviation and Sustainable Development in Nigeria: A Study of Ebonyi State Community Based Poverty Reduction Agency (EB-CPRA). *International Journal of Social Science Studies Vol. 2*(1), 153-163.
- Peters, B. G. (2018). The challenge of policy coordination. *Policy Design and Practice Vol. 1*(1), 1-11.
- Prabhakaran, A., & Kalyani, K. (2014). The thumb generation: ICT application in libraries. *Journal of Library, Information and Communication Technology (JLICT) Vol. 6*(1-2), 42-

47. Retrieved from <http://www.escienceworld.in/index.-php/jlicit/article/view/61/61>
- Putnam, R. D. (1993). The Prosperous Community-Social Capital and Public Life. *American Prospect Vol. 4*(13), 35-42.
- Rauchfleisch, A. (2017). The public sphere as an essentially contested concept: A co-citation analysis of the last 20 years of public sphere research. *Communication and the Public Vol. 2*(1), 3–18. doi:10.1177/2057047317691054
- Sagsan, M., and Sozen, H.C. (2010). The Brokerage Roles in The Organizational Networks and Manipulation of Information Flow. *International journal of eBusiness and eGovernment Studies Vol. 2*(2), 41-51. Retrieved from http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJEBEG/archives/2010/04h_cenk_sozen.pdf
- Sanberg, J. (2015), Evidence-based Policymaking? Revisiting the “Known,” the Assumed and the Promoted in New Social Development Policy. *Journal of Poverty Alleviation and International Development Vol. 6*(2), 47-80.
- Sanders, K., Crespo, M. J. C., and Bacha, C. H. (2011). Communicating Governments: A Three-Country Comparison of How Governments Communicate with Citizens. *The International Journal of Press/Politics Vol. 16*(4), 523-547. <https://doi.org/10.1177/1940161211418225>
- Sparks, C. (2013). What is the “Digital Divide” and why is it Important? *Javnost - The Public, Journal of the European Institute for Communication and Culture Vol. 20* No. 2, 27-46. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13183222.-2013.11009113>

- Sung, T. K. (2018). Industri 4.0: A Korean Perspective. *Technological Forecasting and Social Change Journal, Elsevier Vol. 132(C)*, 40-45.
- United Nations Children's Fund. (2017). *Children in Indonesia: An analysis of poverty, mobility and multidimensional deprivation*. Jakarta: UNICEF.
- Usman, Sunyoto. (2015). *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Voeten, J., de Groot, G., de Haan, J., and Roome, N. (2013). Understanding Responsible Innovation in Small Producers' Clusters in Vietnam through Actor Network Theory (ANT). *The European Journal of Development Research Vol. 27(2)*, 289–307. Retrieved from <https://doi.org/10.1057/ejdr.2014.35>
- Wagner, T. (2008). *The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools Don't Teach The New Survival Skills Our Children Need— And What We Can Do About It and Change Leadership: A Practical Guide to Transforming Our Schools*. New York: Basic Books.
- Wahyunengseh, R.D., Hastjarjo, S., Suharto, D.G. (2018). Social Media and Poverty: Paradoxes of Communicating Poverty Issues on Social Media. *International Journal of Administrative Science & Organization, Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol. 25(3)*, 120-127.
- World Bank. (2016). *World Development Report 2016: Digital Dividends*. Washington, DC: World Bank. doi: 10.1596/978-1-4648-0671-1. Retrieved from <http://documents.worldbank.org>

World Bank. (2016, Januari 13) *Teknologi Digital: Potensi Besar Pembangunan Belum Menjangkau Empat Miliar Orang yang Tidak Memiliki Akses Internet*. Retrieved from <https://www.worldbank.org>

WorldBank. (2011). The Contribution of *Government Communication Capacity to Achieving Good Governance Outcomes Commun. Gov. Account. Progr. (World Bank) Vol:-*, 1–12. Retrieved from <https://assets.publishing-service.gov.uk>

KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DALAM PERSPEKTIF

COLLABORATIVE GOVERNANCE

Bku ini mengupas fenomena kemiskinan sebagai isu publik, dan bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan diimplementasikan untuk mengelola sumber daya publik secara kolaboratif dan adaptif di era teknologi 4.0. Isu yang dibahas meliputi Isu kemiskinan dan SDGs, Kemiskinan dan ICT, Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat,, kemiskinan dna tata kelola pemerintahan.



Rutiana Dwi Wahyunengseh, doktor ilmu Manajemen dan Kebijakan publik dari Universitas Gajah Mada, dengan bidang peminatan kajian perencanaan dan manajemen kebijakan pemerintah daerah



Sri Hastjarjo, Doktor dari University of Newcastle Australia dengan peminatan jurnalisme dan new media



Didik, Doktor ilmu Administrasi publik dari Universitas Brawijaya, dengan bidang peminatan kajian pemerintah daerah dan desa.



Sebelas Maret University Press
Jl. Ir. Sutarni 36 A, Kentingan, Surakarta 57126
Telp. (0271) 646994 Psw.341
www.unspress.uns.ac.id

